

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Patriarki

Struktur patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan perempuan pada posisi subordinat. Keberadaan perempuan dalam masyarakat yang masih terikat pada nilai-nilai patriarki telah menciptakan berbagai permasalahan yang tidak hanya berpengaruh pada kaum perempuan, tetapi juga terakumulasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hubungan antara kedua gender ini telah menjadi realitas sosial yang terbentuk secara historis melalui berbagai proses sosial, yang pada gilirannya menciptakan struktur kekuasaan di mana perempuan sering kali berada dalam posisi yang ter subordinasi, terutama dalam konteks kehidupan seksual. Di dalam tatanan tersebut, perempuan dituntut untuk memenuhi berbagai standar yang ditetapkan oleh laki-laki atau oleh struktur yang menguntungkan kepentingan laki-laki. Sistem ini menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia, seperti ekonomi, sosial, politik, dan psikologi (Ervin Suryaningsih et al., 2024).

Di Korea Selatan, nilai-nilai ini telah mendalam mengakar dalam masyarakat, terutama dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme yang menekankan pentingnya hierarki gender dan peran tradisional. Dalam konteks ini, perempuan sering kali dipandang sebagai pihak yang subordinat, tanpa kekuatan untuk mengambil keputusan penting dalam hidup mereka. Meskipun banyak perempuan Korea yang telah meraih pendidikan tinggi dan berkarir, mereka masih terjebak dalam stereotip gender yang membatasi peran mereka baik di dunia publik maupun di ranah domestik. Hal ini menciptakan dilema bagi perempuan yang berusaha mengejar ambisi karier sambil memenuhi ekspektasi sosial sebagai ibu dan istri.

Dalam sistem patriarki, laki-laki diposisikan memiliki peran utama dan perempuan sebagai pelengkap, sehingga kepala keluarga merupakan laki-laki.

Keputusan seorang ayah sebagai kepala keluarga merupakan sesuatu yang sulit untuk dibantah (Minah, 2019). Dari hal tersebut, sistem patriarki telah meresap ke berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pekerjaan profesional. Meskipun jumlah perempuan yang terjun ke dunia kerja terus meningkat, banyak di antara mereka masih harus menghadapi diskriminasi dan kesulitan dalam mencapai posisi kepemimpinan. Diskriminasi ini semakin diperparah oleh norma-norma sosial yang menganggap bahwa perempuan sebaiknya lebih memusatkan perhatian pada peran domestik mereka daripada karier. Kondisi ini menciptakan tekanan mental bagi perempuan untuk memenuhi harapan ganda yang ditetapkan oleh masyarakat.

2.2 Isu Gender di Korea Selatan

Budaya patriarki dan lingkungan kerja telah mengakar dalam masyarakat Korea Selatan, mempengaruhi setiap aspek kehidupan perempuan mulai dari norma gender, diskriminasi di tempat kerja, standar kecantikan yang kaku, pembagian tugas rumah tangga dan perawatan anak yang tidak setara, hingga tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Korea Selatan memiliki kesenjangan upah gender terburuk di antara negara-negara OECD, diperparah oleh gerakan anti-feminis dan terpilihnya Presiden konservatif Yoon Suk Yeol yang mengklaim diskriminasi gender struktural tidak lagi ada, padahal survei tahun 2021 melaporkan 1 dari 3 perempuan Korea Selatan mengalami kekerasan berbasis gender. Pemerintah Korea Selatan memperkenalkan kebijakan pro-natalitas untuk mengatasi krisis demografi dengan menginvestasikan lebih dari \$200 miliar dalam program yang mendukung institusi patriarki tradisional melalui subsidi perawatan anak, KPR murah, dan cuti melahirkan yang diperpanjang, namun gagal karena ketidakmampuan pemerintah mengatasi akar masalah dan adanya narasi yang menyalahkan perempuan atas rendahnya tingkat kesuburan serta mengabaikan klaim ketidakadilan dari feminis, sementara masalah sebenarnya terletak pada ekspektasi masyarakat dan sikap laki-laki yang menuntut perempuan untuk mengorbankan impian mereka dan tunduk pada suami.

Isu gender di Korea Selatan adalah suatu hal yang kompleks dan berlapis, di mana berbagai faktor sosial, budaya, dan politik saling berinteraksi untuk

membentuk pengalaman perempuan dalam masyarakat. Hal ini terjadi sejak era dinasti di Korea, salah satunya yaitu era Choson. Pada era ini, ideologi neo-Konfusianisme memaksa perempuan untuk menjaga kesucian sebelum menikah dan melarang mereka menikah lagi setelah suami meninggal. Sistem perkawinan juga mengalami pergeseran dari tradisi *namgwiyoŏgahon* (laki-laki pindah ke rumah mertua) menjadi *ch'inyöng jedo* (perempuan pindah ke keluarga suami), serta pembagian istri ke dalam kategori istri sah (*chö*) dan selir (*ch'öp*). Selain itu, terjadi perubahan dalam kedudukan hukum perempuan terkait warisan, dari praktik yang setara gender menjadi sistem pewarisan tunggal oleh putra tertua. Transformasi yang diilhami neo-Konfusianisme ini secara signifikan berkontribusi pada penguatan sistem patriarki selama era Chosön.

Selama periode Dinasti Chosön, pembatasan yang ketat diberlakukan pada perempuan, mencakup larangan mengunjungi kuil, menjadi tuan rumah ritual dukun, pengaturan gaya berpakaian, dan larangan kontak langsung dengan lawan jenis. Keempat peraturan ini, sebagai bagian dari upaya kelas penguasa untuk membangun tatanan neo-Konfusianisme baru, diperkuat di bawah pemerintahan Raja Söngjong, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Nasional *Kyöngguk taejön*, yang memberikan sanksi cambuk bagi wanita yang melanggar (Sook, 2004: 116). Akibatnya, perempuan dari semua kelas (kecuali yang terendah) dipaksa menyembunyikan wajah mereka dengan pakaian luar, yang juga berfungsi mengidentifikasi status sosial mereka. Persepsi tentang keunggulan pria (*namjonyöbi*) juga berkembang pesat, dengan para penguasa yang baru terbentuk mengidentifikasi rusaknya moral perempuan pada era Koryö sebagai penyebab utama krisis sosial pada era tersebut. Buku-buku seperti *Yösasö önhæ* dan *Sasojöl* diterbitkan untuk menguraikan ideologi yang tepat bagi wanita, yang menyebabkan keinginan untuk menjadi wanita berbudi luhur mencapai titik ekstrem, termasuk tindakan bunuh diri setelah suami meninggal. Hal ini mengakibatkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai ideologi neo-Konfusianisme sebagai alat penting untuk mengendalikan perempuan dan memastikan kemurnian garis keturunan ayah di bawah sistem patriarki yang berkembang.

Selama era Chosŏn, lembaga perkawinan memiliki dua tujuan utama: melaksanakan upacara leluhur dan memastikan suksesi garis keturunan pihak ayah (Hee-Sook, 2004). Pada masa pemerintahan Raja Sejong, usia pernikahan diatur, dengan perempuan diharapkan menikah pada usia 14-20 tahun. Tradisi *namgwiŏgahon* (laki-laki pindah ke rumah mertua) dianggap menghambat tujuan masyarakat patrilineal, dan Chŏng Do-jŏn menganjurkan penggantian dengan sistem *ch'inyŏng* (perempuan pindah ke keluarga suami), yang kemudian mengakar kuat. Janda secara bertahap kehilangan hak untuk menikah lagi, dan kebijakan pemerintah menganggap pernikahan kedua atau ketiga seorang wanita sebagai dosa yang harus dihukum bagi keturunannya. Dalam kasus perzinahan atau pemerkosaan, wanita biasanya menerima hukuman yang lebih berat daripada pria, dan suami tidak dapat dituduh telah memperkosa istri mereka karena seks merupakan kewajiban moral wanita. Tujuh dosa bagi wanita pada era Chosŏn; tidak menaati mertua, gagal menghasilkan ahli waris laki-laki, perzinahan, kecemburuan, penyakit serius, mencuri, dan berbicara berlebihan. Tujuh dosa ini digunakan untuk melemahkan posisi wanita, dan meskipun ada keadaan tertentu yang memungkinkan perceraian, kejadian tersebut sangat jarang terjadi, yang dimana pada era ini hanya negara dan suami yang dapat mengajukan perceraian.

Meskipun telah terjadi kemajuan dalam hal kesetaraan gender, seperti meningkatnya jumlah perempuan dengan pendidikan tinggi dan keterlibatan mereka di dunia kerja, tantangan yang besar masih tetap ada. Berdasarkan laporan Human Rights Watch (2025), diskriminasi struktural terhadap perempuan dan anak perempuan masih meluas, dengan Korea Selatan tercatat sebagai negara terburuk bagi perempuan pekerja di antara 29 negara anggota OECD yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kemajuan, masih banyak usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati.

Salah satu aspek krusial dari isu gender di Korea Selatan adalah terdapatnya kesenjangan upah yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Data menunjukkan bahwa perempuan mendapat bayaran sekitar 30 persen lebih rendah dibandingkan rekan laki-laki mereka yang memiliki posisi sama (Human Rights

Watch, 2025). Kesenjangan ini tidak hanya menggambarkan ketidakadilan ekonomi, tetapi juga menguatkan stereotip bahwa perempuan dianggap kurang mampu atau kurang berharga di dunia kerja. Hal ini menciptakan siklus di mana perempuan merasa tertekan untuk menerima posisi yang lebih rendah dan gaji yang lebih kecil, sekaligus memperkuat internalisasi nilai-nilai patriarki dalam masyarakat.

Upaya meningkatkan status perempuan di Korea Selatan yang dimulai sejak tahun 1980 menghasilkan Undang-Undang Kesempatan Kerja yang Setara tahun 1987, Undang-Undang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga tahun 1997, penerapan kuota 30% untuk pencalonan publik perempuan pada tahun 2000, dan penghapusan sistem keluarga patriarki pada tahun 2005, yang menunjukkan peningkatan status sosial perempuan Korea dalam 30 tahun terakhir, khususnya dalam partisipasi ekonomi, tingkat pendidikan, partisipasi politik, dan perlindungan hukum dari kekerasan terhadap perempuan (Kim, 2011). Namun, kemajuan ini mengalami penundaan karena adanya penolakan dari masyarakat yang masih memegang sistem patriarki, di mana perempuan masih berada dalam posisi yang lebih lemah di pasar tenaga kerja, kurangnya representasi dalam posisi pengambil keputusan, peningkatan kekerasan terhadap perempuan, dan tantangan dalam menyeimbangkan kehidupan dan pekerjaan bagi wanita yang sudah menikah karena pekerjaan rumah tangga tetap menjadi pelengkap tugas pekerjaan mereka, sementara kesetaraan gender diterima dalam wacana resmi, banyak domain seperti pendidikan, ketenagakerjaan, politik, dan keluarga masih menunjukkan hierarki gender tradisional yang lebih memihak laki-laki.

Muncul sekitar tahun 2018, gerakan "4B" merupakan gerakan sukarela selibat bagi perempuan di Korea Selatan, yang mendorong perempuan untuk menolak pernikahan heteroseksual, melahirkan, berpacaran, atau berhubungan seks dengan laki-laki, dengan tujuan melepaskan diri dari hubungan dengan laki-laki sepenuhnya. Gerakan ini memperoleh perhatian karena ketidakpuasan yang meluas terhadap budaya patriarki yang mengakar kuat, dengan akar yang terkait dengan tantangan berkelanjutan yang dihadapi oleh perempuan selama modernisasi

ekonomi yang pesat, termasuk kesenjangan upah gender terburuk di dunia dan rendahnya tingkat kesuburan. Selain itu, gerakan 4B muncul sebagai respons terhadap kekerasan gender, yang dipicu oleh pembunuhan seorang wanita di dekat Stasiun Gangnam di Seoul pada tahun 2016, yang memicu diskusi tentang misogini di negara tersebut. Dalam tatanan masyarakat yang kompleks ini, gerakan 4B dan feminisme telah menjadi isu yang sangat memecah belah, dengan pemilihan Presiden Yoon Suk Yeol yang telah memperdalam perpecahan ini melalui usulan penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga dan klaim kontroversial tentang rendahnya angka kelahiran yang disebabkan oleh feminisme. Selain gerakan 4B, gerakan *Escape the Corset* juga memperoleh momentum, mendesak para wanita untuk menentang standar kecantikan yang kaku dengan menolak tata rias dan operasi kosmetik.

Partisipasi politik perempuan merupakan isu yang sangat penting dalam konteks gender di Korea Selatan. Meskipun jumlah perempuan yang terlibat dalam politik mengalami peningkatan, representasi mereka masih sangat minim. Hyobin Lee profesor politik dan etika Chungnam National University dalam wawancaranya bersama DW mengatakan bahwa partisipasi politik perempuan di Korea Selatan masih jauh dari harapan, di mana banyak perempuan merasa terpinggirkan dalam pengambilan keputusan yang krusial. Hal ini mencerminkan pengucilan perempuan yang mengakar kuat dalam politik di Korea Selatan. Seperti diungkapkan oleh Hyobin Lee profesor politik dan etika Chungnam National University (2024) *“There is even an old Korean saying, 'If a hen crows, the household will fall,' which implies that women should not voice opinions in political matters”*.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun banyak kebijakan telah diterapkan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di Korea Selatan, pengaruh patriarki masih sangat mendalam dalam struktur masyarakat. Hal ini mencerminkan norma sosial yang mendorong perempuan untuk tidak aktif menyuarakan pendapat mereka dalam urusan politik, yang pada gilirannya membatasi partisipasi mereka dalam diskusi publik dan proses pengambilan keputusan. Hyobin Lee menekankan

bahwa budaya patriarki yang kuat di Korea Selatan membuat suara perempuan sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas keluarga dan masyarakat.

Menurut laporan Human Rights Watch (2025) dalam partisipasi politik di Korea Selatan perempuan hanya menduduki 16 persen kursi dewan secara nasional. Ketidaksetaraan ini diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang sering kali kurang mendukung upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam arena politik. Sebagai contoh, keputusan Presiden Yoon Suk Yeol untuk menghapus Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga menimbulkan kekhawatiran akan adanya kemunduran dalam perjuangan menuju kesetaraan gender.

2.3 Drama Korea

Drama korea atau yang akrab disebut drakor, telah berkembang menjadi fenomena global yang bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang kompleks. Daya tarik drama korea tidak hanya terletak pada alur ceritanya yang menarik tetapi karakter setiap tokohnya semakin berkembang. Salah satunya melalui karakter- karakter perempuan yang kompleks. Drama Korea memberikan dampak baik bagi para penonton, terutama remaja perempuan, untuk mengeksplorasi potensi dan meraih impian mereka tanpa terkekang oleh norma-norma sosial yang kaku (Hafifah et al, 2024). Hal ini menjadikan drama Korea sebagai tontonan yang berbeda dari produksi lokal seperti sinetron, yang sering kali dianggap kurang bervariasi dan bertele-tele. Ciri khas drama Korea adalah penggunaan *mise-en-scène* yang sinematik dan estetika olah rasa dalam hubungan percintaan, hal ini menjadi ciri khas drama Korea untuk menarik penonton dari negara-negara di Asia (Ayu et al., 2021: 278).

Drama Korea secara historis telah mengalami perubahan dalam tema, karakterisasi, dan nilai-nilai sosial yang diusung seiring dengan pertumbuhan pesat industri hiburan Korea Selatan. Drama korea tidak hanya mulai menampilkan kisah romansa konvensional, tetapi juga mulai menampilkan dinamika sosial, perubahan peran gender, dan kritik terhadap norma-norma budaya saat ini. Perubahan-perubahan ini mencerminkan respons terhadap kondisi sosial budaya yang lebih luas, termasuk persepsi yang berubah terhadap wanita.

Pertumbuhan popularitas drama Korea di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika industri media nasional pada akhir abad ke-20. Liberalisasi itu dimulai pada tahun 1989, dengan didirikannya lima stasiun TV swasta dalam sebuah mediascape Indonesia yang sebelumnya hanya ada satu stasiun TV milik negara yakni TVRI (Sair, 2020). Kehadiran stasiun-stasiun televisi swasta ini membuka peluang bagi masuknya berbagai konten asing, termasuk drama Korea, ke dalam konsumsi media masyarakat Indonesia. Dengan semakin terbukanya akses terhadap berbagai pilihan tayangan, masyarakat mulai mengenal alternatif hiburan baru di luar dominasi sinetron lokal atau tayangan barat. Drama Korea, dengan keunikan narasi, estetika visual yang kuat, dan kedekatan nilai budaya Asia, dengan cepat mengisi ruang-ruang baru dalam preferensi tontonan masyarakat.

Drama Korea memiliki berbagai genre seperti drama, romantis, sejarah, thriller, keluarga, dan komedi, dan dikemas dengan menarik dan menampilkan aktor dan aktris berbakat dengan penampilan menawan. Keberhasilan mereka dalam menarik perhatian penonton dari seluruh dunia telah mengangkat industri hiburan Korea Selatan secara signifikan. Selain itu, drama ini juga berfungsi sebagai alat yang membantu Korea Selatan menyebarkan teknologi modern, nilai keluarga, dan budaya.

Pada masa awal penyebarannya di Indonesia, tema yang diangkat dalam drama Korea cenderung bersifat universal, dengan penekanan pada nilai-nilai kekeluargaan, cinta, dan perjuangan hidup, sehingga mudah diterima oleh berbagai kalangan. Mayoritas drama yang disiarkan adalah yang berbasis pada historis dan romantisme sehingga cocok untuk dikonsumsi penonton dari lapisan manapun (Ardia et al., 2014). Tema historis, seperti dalam drama *Dae Jang Geum*, memperkenalkan kekayaan budaya dan nilai tradisional Korea, sedangkan tema romantisme seperti dalam *Winter Sonata* menawarkan narasi emosional yang mampu membangun kedekatan psikologis dengan penonton lintas usia dan budaya. Strategi ini secara efektif memperluas basis penggemar drama Korea dan menjadikan Hallyu sebagai fenomena budaya global yang populer.

Hallyu telah menjadi ekspor budaya utama di industri penyiaran Korea Selatan dan memainkan peran besar dalam pendapatan negara. Drama Korea di Indonesia telah menjadi bagian dari budaya populer yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti gaya hidup, fashion, makanan, dan pilihan destinasi wisata. Drama Korea menjadi semakin populer selama pandemi COVID-19, berkat kemampuan untuk diakses melalui platform online seperti *Netflix* dan *Viu* menjadikan Drama Korea sebagai budaya yang populer di Indonesia hingga saat ini.

2.4 Landasan Teori

Istilah dekonstruksi awalnya berasal dari Martin Heidegger, yang menyuarakan dilakukannya destruksi atau dekonstruksi sejarah ontologi Barat. Dalam penggunaannya kemudian, dekonstruksi menjadi sebuah metode penting yang banyak digunakan oleh para filsuf dan pemikir sosial. Dekonstruksi, menurut Derrida adalah juga strategi untuk memeriksa sejauh mana struktur-struktur yang terbentuk hendak dimapankan batas-batasnya dan ditunggalakan pengertiannya, yakni melalui pembalikan hierarki oposisi biner secara terus-menerus (Hidayat, 2019: 56).

Jacques Derrida, dalam karyanya *Of Grammatology*, menolak tradisi filsafat Barat yang terpusat pada *logocentrism*, sebuah keyakinan bahwa kebenaran esensial dapat ditemukan dalam bahasa (Spivak, 1997). Sebagai alternatif, Derrida memperkenalkan konsep *différance*, yang menggarisbawahi bahwa makna tidak pernah sepenuhnya hadir, melainkan terus-menerus ditangguhkan dan dibedakan. Hal ini menantang gagasan bahwa bahasa adalah representasi langsung dari realitas, melainkan sistem perbedaan yang kompleks dan dinamis.

Derrida (dalam Setyawati, 2020: 2) menjelaskan bahwa dekonstruksi merupakan sistem pemikiran yang menyatakan perlawanan kuat terhadap gagasan umum. Perhatian pembacaan dekonstruksi tertuju pada segala sesuatu di dalam bahasa dan tekstualitas yang menolak dan memperluas gagasan umum untuk menghasilkan gagasan baru. Ketika membaca suatu penanda, makna tidak serta merta menjadi jelas. Makna terus menerus bergerak di sepanjang mata rantai

penanda. Dari dua pendapat Derrida tersebut dapat diketahui bahwa dekonstruksi merupakan upaya menstabilkan makna utama dengan melacak makna tersembunyi yang lepas dari perhatian.

Salah satu prinsip dasar dari dekonstruksi adalah bahwa teks tidak memiliki makna tunggal atau tetap. Derrida berpendapat bahwa setiap teks mengandung kontradiksi dan ambiguitas yang dapat diungkap melalui analisis kritis. Dalam *Queenmaker*, kita dapat melihat bagaimana karakter perempuan berjuang melawan ekspektasi patriarki sambil tetap terjebak dalam struktur sosial yang ada. Ketegangan ini menciptakan ruang bagi interpretasi yang beragam dan menunjukkan bahwa representasi gender dalam drama tersebut tidaklah sederhana, melainkan dipenuhi dengan nuansa dan kompleksitas.

Derrida menekankan perlunya dekonstruksi besar-besaran terhadap konsep-konsep dan frasa-frasa metafisik yang terkondensasi dan mengendap dalam pemikiran tradisional. Meskipun Derrida kadang menggunakan istilah "penghancuran," proses ini tidak semata-mata destruktif. Sebagaimana dijelaskan oleh Paul de Man, dekonstruksi melibatkan penghancuran sebuah konstruksi, yang membuka kemungkinan untuk membangunnya kembali (Spivak, 1997: 46). Ini menunjukkan bahwa dekonstruksi bukan hanya tentang pembongkaran, tetapi juga tentang membuka ruang untuk pemikiran dan pemahaman baru. Dekonstruksi bukan sekadar membalikkan hierarki oposisi biner. Setelah pembalikan selesai, istilah yang dominan pun harus dihilangkan. Tujuannya adalah menciptakan ruang bagi lahirnya gagasan-gagasan baru yang bebas dari batasan rezim lama maupun sistem oposisi yang ada.

Melalui teori dekonstruksi, kita dapat mengidentifikasi hierarki oposisi yang sering kali mendasari narasi patriarki, seperti kekuatan versus kelemahan atau dominasi versus subordinasi. Dengan membalikkan hierarki ini, dekonstruksi membuka kemungkinan untuk memahami bagaimana karakter-karakter perempuan dalam *Queenmaker* tidak hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka berada dalam sistem

patriarkal, mereka memiliki potensi untuk menantang dan merombak struktur tersebut.

Derrida (Ningrum et al., 2020) mengatakan bahwa ciri khas dekonstruksi adalah penolakannya terhadap *logosentrisme* dan *fonosentrisme* yang secara keseluruhan melahirkan oposisi biner dan cara-cara berpikir lainnya yang bersifat hierarki dikotomis. Sebagai cara baca, dekonstruksi memiliki perbedaan dengan pembacaan biasa. Pembacaan biasa selalu mencari makna sebenarnya dari teks, atau bahkan kadang berusaha menemukan makna yang lebih besar yang teks itu sendiri barangkali tidak pernah memuatnya. Adapun pembacaan dekonstruktif hanya ingin mencari ketidakutuhan atau kegagalan tiap upaya teks menutup diri dengan makna atau kebenaran tunggal.

Dekonstruksi juga dapat digunakan untuk menganalisis berbagai konstruksi sosial. Pemikiran dekonstruksi beranggapan bahwa sebuah teks atau konstruksi sosial menyimpan makna-makna yang tersembunyi dan dapat memiliki arti yang bervariasi, tergantung pada penafsiran individu. Dengan demikian, proses dekonstruksi memerlukan pencarian makna secara komprehensif, menjelajahi makna tunggal yang selama ini disepakati bersama dalam bentuk konstruksi sosial.

Dekonstruksi menjadi alat yang sangat efektif untuk mengungkap ideologi-ideologi tersembunyi yang tertanam dalam sebuah teks. Seperti yang dijelaskan oleh Derrida, sebuah teks tidak pernah berada pada posisi netral atau objektif; ia selalu dipengaruhi oleh kepentingan dan asumsi-asumsi tertentu (Derrida, 1997). Melalui dekonstruksi, penelitian ini dapat mengidentifikasi bagaimana drama Korea, seperti *Queenmaker*, baik mereproduksi maupun menantang norma-norma sosial dan budaya yang mendominasi. Tujuan dekonstruksi bukanlah mencari inkonsistensi logis, melainkan melacak unsur-unsur filosofis yang memungkinkan teks itu menjadi filosofis, termasuk tatanan yang tidak disadari yang mendasari pemikiran subjek (Spivak, 1997: 413).

Dengan mengidentifikasi hierarki oposisi biner yang terdapat dalam *Queenmaker*, kita dapat mulai mengupas asumsi-asumsi yang mendasari narasi patriarki. Sebagai contoh, oposisi antara "perempuan kuat" dan "perempuan lemah" sering kali digunakan untuk membatasi cara perempuan diwakilkan dalam media. Namun, melalui proses dekonstruksi, kita dapat menunjukkan bahwa kedua kategori ini tidak bersifat tetap atau absolut, melainkan saling bergantung dan dapat dipertukarkan (Haruta, 2018: 16).

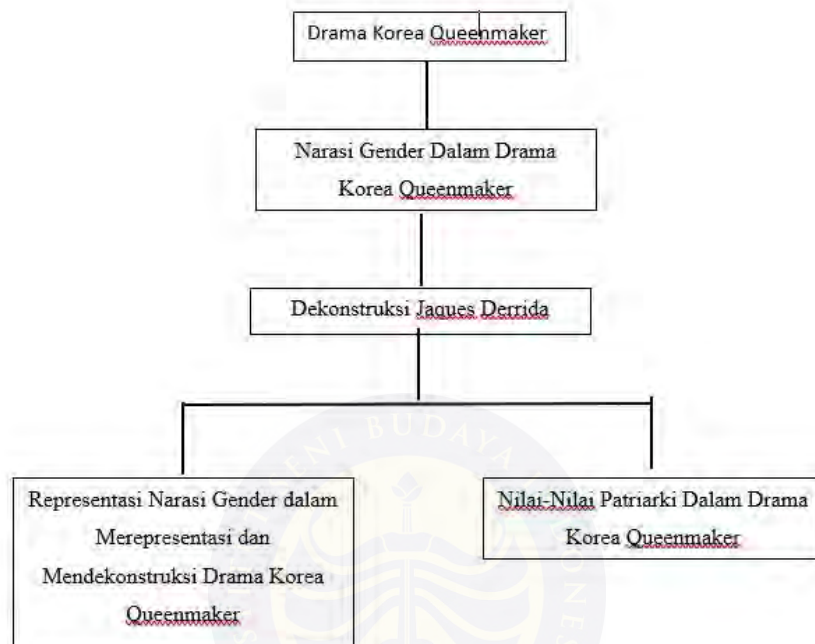
Menurut Rodolph Gasche (Haruta, 2018: 13), tahap-tahap dekonstruksi terbagi tiga yaitu:

- a) Mengidentifikasi hierarki oposisi biner dalam teks di mana biasanya terlihat peristilahan mana yang diistimewakan secara sistematis dan mana yang tidak.
- b) Membongkar oposisi biner, yaitu dengan cara membalik oposisi biner marginal jadi dominan, *decentering*, *sous rature*, dan pengubahan sudut pandang dalam melihat sesuatu.
- c) Memperkenalkan sebuah gagasan baru yang ternyata tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori oposisi lama.

2.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan berfokus pada dekonstruksi patriarki drama korea *Queenmaker* dilihat melalui pendekatan dekonstruksi Jaques Derrida. Dalam hal ini, drama korea hadir bukan hanya sebagai sumber hiburan, tetapi juga sebagai sarana yang efektif untuk menyebarkan kebudayaan serta mencerminkan pola pikir yang berkembang di masyarakat. Drama korea *Queenmaker* mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, di mana karakter-karakter perempuan berjuang untuk mengatasi ekspektasi patriarki yang membatasi peran mereka. Dengan narasi yang kuat, *Queenmaker* menggambarkan bagaimana perempuan dapat berperan sebagai agen perubahan dalam ranah politik yang didominasi oleh laki-laki. Dengan adanya dekonstruksi patriarki menjadikan adanya pemahaman bahwa perempuan bisa setara bahkan mendominasi laki-laki. Dekonstruksi patriarki dalam drama

korea Queenmaker akan dianalisis melalui dekonstruksi Jaques Derrida sebagai pisau bedah dalam penelitian ini. Pembahasan akan difokuskan pada dua aspek, yakni narasi gender dan dekonstruksi patriarki.



Bagan 1.2 Kerangka Pemikiran